

## ANALISIS RALISASI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2016-2017

DESSY.T, Martinus Robert H., Pantas P.Pardede  
Program Studi Akuntansi  
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia  
[Dessychristiani108@gmail.com](mailto:Dessychristiani108@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektif dan efisien pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau tahun 2016-2017 yang sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi terjadi di tahun 2017 dan terendah terjadi pada tahun 2016. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2017 dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2016 tingkat efektifitasnya masih kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan tetapi tidak dilaksanakan. Tetapi untuk kegiatan lain yang dianggarkan sudah efektif. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau menilai kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan, maka kegiatan tersebut dikatakan efektif pelaksanaan anggaran Belanja DPU.PR-Perkim Tahun 2016-2017, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2016-2017 dikategorikan efisien.

**Kata kunci:** Varians Belanja, Efisiensi Belanja, Keserasian Belanja

### PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengandung perhatian publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat pemberi dana publik (*public fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban yang utama dalam suatu instansi yang bergerak dibidang jasa maupun non jasa baik swasta maupun pemerintah.

### DASAR TEORI

Selisih belanja dan realisasi menurut Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Malinau adalah selisih antara anggaran belanja dengan realisasi belanja yang terdiri pada suatu periode tersebut baik itu selisih lebih maupun selisih kurang yang diukur dengan skala rasio. Kinerja Menurut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Efisiensi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau adalah pengehematan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Anggaran memiliki peranan penting dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Menyusun anggaran dari setiap program organisasi dapat menjadi tugas

yang cukup berat dan membebani. Namun demikian, hal ini sangat penting bagi organisasi yang merupakan untuk merencanakan dan memastikan bahwa sebuah organisasi telah mengelolah anggaran belanjanya dengan efektif dan efisien.

### METODE ANALISIS

Untuk memberikan penjelasan mengenai indicator yang digunakan dalam penelitian, maka definisi oprasional variabel dapat dijelaskan varians adalah seselisih antara target dan realisasi anggaran. Secara praktis, hampir selalu terjadi varians dalam melakukan analisis pencapaian target-target anggaran dipemerintahan daerah. Efisiensi belanja adalah tinggat kehematan dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Efisiensi terbagi menjadi dua, yaitu efisien waktu dan efisien biaya. Keserasian adalah untuk mengetahui tingkat rasiobelanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio langsung serta tidak langsung.

### HASIL PEMBAHASAN

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Pesentase	Varians
2016	Rp.402,278,953,132	Rp.316,626,040,009	Rp.78,708,079,94	78,62%	Kurang Efisien
2017	Rp.302,636,323.296	Rp.288,719,546,864	Rp.95,401,485,1	95,40%	Cukup Efisien

Sumber : Mahmudi 2016

Varians Belanja tahun 2016 Realisasi Belanja Daerah dengan sebesar Rp.316,626,040,009 nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan target penerimaan Belanja daerah tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp.402,278,953,132 dan memiliki selisih Rp.78,708,079,94 apabila dipersentasekan maka untuk Belanjadaerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau pada tahun 2016 sebesar 78,62% hal ini jika dilihat dari kriteria maka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2016 cukup efektif, Sedangkan pada tahun 2017 Belanja daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau untuk realisasi Belanja daerah dengan nilai sebesar Rp.288,719,546,864.00 nilai ini kecil dibandingkan dengan target penerimaan Belanja daerah tahun 2017 dengan nilai sebesar Rp.302,636,323.296 apabila dipersentasekan maka untuk Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Malinau pada tahun 2017 sebesar 95,40% hal ini jika dilihat dari kriteria maka Anggaran Belanja tahun 2017 efektif.

Jika dilihat dari presentasi memang tidak begitu besar namun jika dilihat dari nominalnya cukup signifikan. Dalam melakukan analisis varian anggaran, tetapi presentase bukanlah tolak ukur untuk mengetahui apakah terjadi penghematan, tetapi dengan jumlah nominalnya. Meskipun secara presentase kecil tetapi secara nominal cukup signifikan, maka dapat dikatakan kinerja baik dan peyerapan anggaran terlalu rendah.

Tahun	Realisasi	Anggaran	Predikat
2016	Rp.402,278,953,132	Rp.316,626,040,009	Efisien
2017	Rp.302,636,323.296	Rp.288,719,546,864.00	Efisien

Sumber : Mahmudi 2016

Efisiensi Belanja tahun 2016 sebesar 78,62% Efisiensi belanja tersebut tersebut terdiri dari belanja Operasi mengalami efisiensi sebesar 91,56% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 91,56%, belanja subsidi sebesar 99,70%, belanja hibah sebesar 91,40% dan belanja langsung mengalami efisiensi belanja sebesar 76,71% yang terdiri dari

belanja Modal tanah sebesar 100%,belanja Modal peralatan dan Mesin sebesar 98,64%,belanja modal bangunan dan gedung sebesar 37,02% dan belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami efisiensi belanja sebesar 76,80%. ini disebabkan belanja tidak langsung mengalami penurunan. Sehingga belanja langsung yang merupakan belanja pembangunan membesar dan berakibat bertambahnya dana yang bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga efisiensi belanja ini termasuk dalam kategori penilaian kurang efisiensi karena rasio belanja kurang dari 75%, sesuai dengan kategori predikat efisiensi belanja, yang dikemukakan oleh (Mahmudi 2016).

Pada tahun 2017 sebesar 93,40% rasio efisiensi belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung mengalami sebesar 93,61% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 95,98%, belanja subsidi sebesar 95,51%, belanja hibah sebesar 90,67% belanja bantuan sosial 0,00% dan belanja langsung mengalami efisiensi belanja sebesar 95,66% yang terdiri dari belanja Modal tanah sebesar 95,58%,belanja Modal peralatan dan Mesin sebesar 97,04%,belanja modal bangunan dan gedung sebesar 85,44% dan belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami efisiensi belanja sebesar 95,72% belanja aset tetap lainnya mengalami kurang efisien sebesar 58,58%. rasio efisiensi belanja pada tahun 2017 termasuk dalam kategori penilaian cukup efisiensi karena rasio belanja melebihi dari 90% yang dikemukakan oleh (Mahmudi 2016).

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Belanja Modal	Total Belanja	keserasian		
					Belanja tidak langsung	Belanja langsung	Belanja modal
2016	7,005,821,232	370,285,978,735	357,917,489,262	735,209,289,229	0,95%	50,36%	48,68%
2017	9,069,486,807	279,650,060,057	252,589,854,107	541,309,400,901	1,67%	51,66%	46,66%

Sumber : Mahmudi 2016

Keserasian belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau, untuk Rasio Belanja terhadap Total Belanja pada tahun 2016 sebesar 48,68% dan pada tahun 2017 sebesar 46,66% sehingga mengalami penurunan rasio sebesar 2,02% ini disebabkan karena adanya realisasi belanja modal dan total belanja mengalami penurunan.

Rasio belanja langsung terhadap total belanja pada tahun 2016 sebesar 50,36% dan pada tahun 2017 sebesar 51,66% sehingga mengalami penurunan sebesar 1,30% ini disebabkan karena belanja langsung dan total belanja mengalami penurunan.

Rasio tidak langsung terhadap total belanja pada tahun 2016 sebesar 0,95% dan pada tahun 2017 sebesar 1,67% sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,72% ini disebabkan adanya peningkatan belanja tidak langsung sedangkan total belanja mengalami penurunan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Tingkat varians belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau dapat dikatakan efisien karena selisih varians dari tahun 2016-2017 rata-rata menunjukkan sebesar 88,95%. Efisiensi belanja dari tahun 2016 sampai dengan 2017 cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan karena nilai PDRB yang tiap tahunnya meningkat sehingga berpengaruh terhadap Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau serta terhambatnya kegiatan oprasi pembuatan jalan, jembatan, dan irigasi. Efisiensi belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau sebesar 88,95% dapat dikategorikan efisiensi karena rata-rata

efisiensi belanja ini berbeda pada kisaran 75%-89%. Keserasian belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau dari tahun 2016 sampai dengan 2017 baik belanja langsung, tidak langsung dan belanja modal cenderung mengalami penurunan disebabkan karena adanya kejadian-kejadian yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan peroyek, seperti curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan banjir, alat rusak, dan lain sebagainya.

### **SARAN**

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau diharapkan lebih meningkatkan modal yang dinunakan untuk aset-aset tetap akan berguna dalam jangka panjang yang akan memberikan manfaat pada masa yang akan datang. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau diharapkan dapat mempertahankan atau lebih meningkatkan rasio efisiensi belanjanya. Dimasa yang akan datang. Untuk penelitian selanjutnya jumlah responden lebih baik digunakan dengan jumlah banyak, agar mengetahui apakah pada point kepuasan kerja bisa terlihat angka yang positif dan terealisasi dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adri Satriawan Surya Raja, 2012, Akuntansi Keuangan Versi IFRS +. Graha Ilmu, Yogyakarta. Hal.36
- Darise, 2008, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama, PT Indeks Jakarta. Hal.95
- Fitriana, Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Tenggarong, 2018
- Halim, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah 2009, Edisi ketiga, Penerbit Selamba Empat, Hal.34
- Harahap, 2010, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Rajawali Persada : Jakarta Hal.257
- Jusup, 2008, Dasar - dasar Akuntansi Edisi7, Jilid 1 Hal. 4
- Horngren T. Charles, dan Harrison T. Walter T. Harrison, Akuntansi 2008, Edisi -7, Penerbit Erlangga, Hal.9
- Khoirul Arifa Naima, Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Dan Kesuaian Penyajian Laporan Terhadap PSAP 02 Pada Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2017
- Mahmudi, 2016, Analisa Laporan Keuangan Daerah, Edisi tiga, Penerbit Unit Penerbit Hal.180
- Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 4, Penerbit Andi, Yogyakarta. Hal.12
- Munandar, 2010, Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja, Yogyakarta : BPF, Hal.5
- Sari Ramadha Puspita, Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2018
- Suparmoko, 2008, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (suatu pendekatan teoritis), BPF Yogyakarta. Hal.47
- Warren, Warren Reeve Fass Accounting Pengantar Akuntansi, 2008, Edisi kedua, Penerbit Selamba Empat, Hal.10
- Yani Ahmad, 2009, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Edisi Revisi, Rajawali Pres. Jakarta Hal.373